

# Ringkasan Peristiwa ASEAN

## DEKLARASI ASEAN DAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

### I. KTT MANILA

- A. Persiapan KTT ASEAN III
- B. Pembicaraan Selama KTT
- C. Deklarasi Manila

### F. Usaha Menanggulangi Bahaya Narkotika

### G. Proyek Baru Kebudayaan

### II. KEGIATAN KERJASAMA ASEAN

- A. Kerjasama Makanan, Pertanian dan Kehutanan
  - 1. Penanaman Modal Perikanan
  - 2. Kerjasama Produsen Karet
  - 3. Pembibitan Rotan

### III. PERGANTIAN SEKNAS ASEAN

### IV. KERJASAMA PARLEMEN

- B. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
  - 1. Rencana Peningkatan Pariwisata
  - 2. Usaha Menghapuskan Hambatan Nontarif

### V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- A. ASEAN-AS
- B. ASEAN-Kanada
- C. ASEAN-MEE
- D. ASEAN-Jepang
- E. ASEAN-Australia

### C. Kerjasama Energi ASEAN

### D. Kerjasama Penerbangan

### VI. HUBUNGAN ASEAN-PARLEMEN EROPA

## I. KTT MANILA

### A. PERSIAPAN KTT ASEAN III

Pertemuan Puncak (KTT) ASEAN III yang dihadiri oleh Sultan Brunei, Hossanal Bolkiah, Presiden RI, Soeharto, PM Malaysia, Mahathir Mohamad, PM Muangthai, Prem Tinsulanonda, Presiden Filipina, Corazon Aquino dan PM Singapura, Lee Kuan Yew, berlangsung di Manila tanggal 14-15 Desember 1987 untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi, politik dan bidang-bidang lainnya.

KTT ini dipersiapkan secara matang selama 18 bulan, dan untuk itu pada bulan Juli 1986 dibentuk HLSC (*High Level Steering Committee*) untuk mempersiapkan substansi KTT ASEAN III. HLSC bersidang 17 kali dan membentuk 15 subkomite untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam KTT.

Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 16 Desember 1987 bahwa: (1) Indonesia telah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan diajukan ke KTT Manila; (2) persiapan itu dilakukan secara sangat terbuka dan tidak hanya dipersiapkan oleh para birokrat, tetapi melibatkan pula kalangan swasta, perguruan tinggi, pengamat politik dan kalangan masyarakat lainnya; (3) langkah Indonesia ini diikuti pula oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Mereka juga menampung berbagai pikiran masyarakat (*Kompas*, 17-12-1987).

Pembicaraan mengenai rencana peningkatan kerjasama ekonomi di antara negara anggota ASEAN berjalan lancar, sedangkan mengenai politik dan keamanan regional, khususnya tentang kemandirian ASEAN, berlangsung cukup alot (*Suara Karya*, 19-11-1987). Hal ini antara lain tampak dalam Sidang HLSC di Bali yang berlangsung tanggal 18-20 November 1987. Tersiar berita mengenai perbedaan pandangan antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia dan Malaysia menekankan perlunya kemandirian ASEAN yang berarti tidak menggantungkan diri pada kekuatan asing mana pun, sehingga perimbangan kekuatan adidaya di kawasan Asia Tenggara tidak perlu dibicarakan (*Suara Karya*, 19-11-1987). Sehubungan dengan masalah ini, Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan kepada para wartawan di Denpasar tanggal 20 November 1987 bahwa ASEAN harus mandiri dalam segala hal, baik politik, ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. ASEAN mandiri berarti ASEAN tidak menggantungkan diri pada kekuatan negara lain, tetapi mengharuskan kerjasama di antara negara-negara maupun kerjasama regional di berbagai bidang (*Antara*, 21-11-1987). ASEAN tidak akan menyatakan pendapatnya tentang kehadiran pangkalan militer AS di Filipina. Ini sesuai dengan prinsip ASEAN. ASEAN bukan merupakan kerjasama militer. Tetapi setiap negara anggota ASEAN bebas menyatakan pendapatnya masing-masing (*Suara Karya*, 21-11-1987).

Sementara itu, situasi keamanan di Filipina, khususnya Manila, telah pula menimbulkan keragu-raguan di antara para pemimpin ASEAN untuk menghadiri KTT ASEAN III. Bahkan timbul pikiran pada beberapa pemimpin ASEAN untuk menunda atau memindahkan KTT itu ke Muangthai (*Kompas*, 2-12-1987). PM Lee Kuan Yew mengatakan pada pembukaan KTT itu bahwa: (1) jika pertimbangan keamanan tidak dilampaui oleh semangat solidaritas ASEAN, para pemimpin ASEAN tidak akan berada di Manila sekarang ini (*Suara Karya*, 15-12-1987); (2) para

III di Manila (*Kompas*, 16-12-1987). Keragu-raguan itu juga muncul dari sebagian rakyat keenam negara anggota ASEAN. Presiden Soeharto sendiri menerima banyak surat dari Orpol, Ormas dan anggota masyarakat lainnya, yang meminta untuk tidak menghadiri KTT ASEAN III karena alasan keamanan (*Kompas*, 16-12-1987).

Keragu-raguan itu hilang oleh keputusan Presiden Soeharto untuk menghadiri KTT ASEAN III di Manila. Presiden Soeharto adalah pemimpin negara anggota ASEAN yang pertama yang menyatakan akan hadir pada KTT ASEAN di Manila (*Suara Karya*, 15-12-1987). Penegasan ini disampaikan ketika ia mengadakan pembicaraan dengan PM Lee Kuan Yew di Pulau Batam tanggal 29 November 1987. Presiden Soeharto mengatakan kepada para wartawan di Pulau Batam tanggal 29 November 1987 itu bahwa kita semua merasa bertanggungjawab agar KTT berjalan baik, walaupun di sana-sini ada risiko. Risiko harus diatasi untuk menunjukkan bahwa di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara terjalin kesetiakawanan, baik ke dalam maupun ke luar Asia Tenggara (*Suara Karya*, 30-11-1987).

Pengakuan atas ketegasan Presiden Soeharto itu juga dinyatakan secara terbuka oleh PM Lee Kuan Yew ketika menyampaikan pidato pada pembukaan KTT ASEAN itu. PM Lee Kuan Yew mengatakan bahwa sikap tegas Presiden Soeharto untuk menghadiri KTT itu kemudian diikuti oleh para pemimpin ASEAN lainnya. Presiden Soeharto tidak pernah ragu-ragu untuk melaksanakan komitmen pada solidaritas ASEAN (*Kompas*, 15-12-1987).

Untuk menunjukkan tanggungjawabnya itu, Indonesia mengirimkan pasukan keamanan dan satuan tugas Angkatan Laut. Presiden Soeharto mengatakan bahwa pengiriman pasukan keamanan dan satuan tugas Angkatan Laut RI itu bukan semata-mata untuk pengamanan dirinya, tetapi karena rasa tanggungjawab bagi suksesnya KTT ASEAN di Manila (*Merdeka*, 16-12-1987).

## B. PEMBICARAAN SELAMA KTT

Pada acara pembukaan KTT itu Sultan Bolkiah dari Brunei mengemukakan bahwa generasi muda ASEAN perlu diberi penerangan mengenai masalah ASEAN agar memiliki pengetahuan tentang organisasi ini. Di samping itu, perlu diadakan pertukaran pelajar di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya Sultan Brunei mengatakan bahwa keamanan dan stabilitas harus merupakan tujuan utama, oleh karena itu masalah Kamboja harus segera diselesaikan (*Kompas*, 15-12-1987).

Pada acara yang sama, Presiden Soeharto mengatakan: (1) ASEAN harus menghindari program kerjasama yang ambisius yang dapat mengorbankan kepentingan salah satu atau beberapa anggotanya; (2) meskipun kerjasama ekonomi, khususnya bidang perdagangan melalui PTA (*Preferential Trading Arrangement* atau Persetujuan Preferensi Perdagangan) dan industri melalui AIJV (*ASEAN Industrial Joint Venture* atau Industri Patungan ASEAN), telah mengalami kemajuan, ASEAN agar tetap memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi serta perbedaan ekonomi di antara para anggotanya; (3) untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota ASEAN serta menghadapi situasi dan perkembangan dunia, ASEAN agar melengkapi dan menyempurnakan strategi yang telah digariskan; (4) sebagai wadah kerjasama regional, ASEAN

bangan ASEAN; (5) persaingan pengaruh antara negara-negara besar dapat menimbulkan ketegangan politik, oleh karena itu bangsa-bangsa Asia Tenggara harus mencari upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasannya; (6) kesepakatan ASEAN untuk mengembangkan dan mewujudkan Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara sebagai salah satu komponen penting ZOPFAN merupakan perkembangan penting untuk kerjasama politik (*Kompas*, 15-12-1987); (7) realisasi ZOPFAN sangat penting bagi stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara dan akan lebih menjamin kesinambungan, kelancaran dan keberhasilan pembangunan nasional masing-masing negara di Asia Tenggara (*Merdeka*, 15-12-1987).

PM Mahathir Mohamad mengemukakan perlunya keterbukaan dan penghapusan hambatan-hambatan di antara negara ASEAN, sehingga perdagangan antar mereka dapat meningkat. Selanjutnya PM Malaysia itu mengatakan bahwa: (1) ASEAN yang kaya sumberdaya alam harus mampu menjadi pusat pertumbuhan di masa yang akan datang; (2) ASEAN harus mampu memecahkan masalah ekonomi regional untuk mengatasi situasi ekonomi dunia, dan kebersamaan ASEAN merupakan suatu kekuatan yang besar untuk menghadapi negara-negara industri maju. Mengenai keamanan kawasan Asia Tenggara, PM Mahathir Mohamad mengatakan bahwa: (1) tercapainya kesepakatan mengenai ZOPFAN merupakan tujuan utama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara; (2) jika negara-negara besar menginginkan tetap berlangsungnya perdamaian di kawasan Asia Tenggara, mereka harus meningkatkan bantuannya (*Kompas*, 15-12-1987); (3) Asia Tenggara untuk rakyat Asia Tenggara. Malaysia menolak kemungkinan ASEAN berkembang menjadi suatu persatuan keamanan kolektif, regional atau persekutuan militer (*Merdeka*, 15-12-1987).

PM Prem Tinsulanonda menekankan pentingnya penyelesaian masalah Kamboja, karena Kamboja berbatasan langsung dengan negaranya. Sikap Vietnam yang tidak bersedia bertemu dengan Pangeran Norodom Sihanouk merupakan sikap politik yang tidak realistis. Selanjutnya dia mengatakan bahwa: (1) kehadiran dan persaingan empat kekuatan besar, yakni AS, Uni Soviet, Jepang dan RRC di Asia Tenggara, merupakan hambatan untuk menumbuhkan ZOPFAN; (2) industrialisasi di ASEAN sekarang ini dapat dipergunakan sebagai sarana terbaik untuk melanjutkan kerjasama ekonomi ASEAN (*Kompas*, 15-12-1987).

PM Lee Kuan Yew sangat memuji peranan Presiden Soeharto yang dikatakannya sebagai Pendekar Solidaritas ASEAN. Selanjutnya ia mengatakan bahwa: (1) keputusan Presiden Soeharto untuk menghadiri KTT III ASEAN itu merupakan faktor utama suksesnya KTT tersebut. Sikap yang demikian itu juga mencerminkan keinginannya agar para pemimpin ASEAN menunjukkan kesatuan dukungan ASEAN terhadap kepemimpinan Presiden Corazon Aquino yang sedang mengalami banyak cobaan (*Suara Karya*, 15-12-1987); (2) ASEAN perlu memikirkan kembali situasi dirinya, karena dunia telah mengalami perubahan-perubahan; (3) langkah-langkah untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat harus segera diambil; (4) negara-negara anggota ASEAN agar tetap menjaga persatuan nasional untuk melawan komunis dan tindakan lain yang berusaha memecah-belah rakyat atas dasar perbedaan suku, bahasa ataupun agama; (4) kemajuan di bidang PTA dan AIJV merupakan bukti peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN (*Kompas*, 15-12-1987).

Presiden Corazon Aquino mengatakan bahwa: (1) stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara merupakan faktor yang sangat penting untuk melaksanakan kerjasama ekonomi;

nam yang mempunyai kekuatan angkatan bersenjata keempat di dunia bukan merupakan ancaman bagi Filipina; (3) negaranya telah berperan untuk memberi sumbangan guna mengamankan udara dan lautan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Pengamanan itu penting karena wilayah itu merupakan jalur utama untuk menjaga stabilitas dan pembangunan ekonomi; (4) pembangunan ekonomi merupakan tujuan ASEAN, tetapi hasil akhir yang diinginkan adalah perdamaian abadi di ASEAN (*Kompas*, 15-12-1987).

### C. DEKLARASI MANILA

KTT Manila diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Manila 1987, empat perjanjian dan sebuah *Memorandum of Understanding* tentang peningkatan kerjasama ekonomi.

Deklarasi itu menegaskan kembali prinsip-prinsip ASEAN dan menetapkan arah kerjasama ASEAN yang lebih progresif dan terpadu. Deklarasi yang meliputi kerjasama politik, kerjasama ekonomi, hubungan dengan mitra wicara (*dialogue partners*), kerjasama fungsional dan mekanisme kerjasama ASEAN itu menyatakan antara lain bahwa: (1) pertentangan yang terjadi di antara negara anggota ASEAN harus dipecahkan dalam kerangka Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan di Asia Tenggara serta Piagam PBB; (2) setiap negara anggota ASEAN bertanggungjawab atas keamanannya sendiri, namun demikian kerjasama keamanan dengan negara di luar ASEAN dapat diteruskan untuk kepentingan masing-masing; (3) berbagai usaha untuk mewujudkan ZOPFAN di Asia Tenggara akan terus dilanjutkan, dan sebagai langkah pertama untuk mencapainya kawasan Asia Tenggara terlebih dahulu harus menjadi kawasan yang bebas dari segala jenis senjata nuklir; (4) masalah Kamboja harus terus-menerus ditangani dan dicarikan penyelesaian yang paling baik. Sikap Vietnam yang menyambut baik usaha ASEAN diharapkan menghasilkan pemecahan yang terbaik; (5) ASEAN agar terus mengembangkan kerjasama industri dan pembangunan dengan negara-negara Pasifik; (6) ASEAN sepakat untuk meningkatkan jumlah barang yang masuk PTA (Perjanjian Preferensi Perdagangan), dan mengurangi barang-barang yang termasuk kekecualian (*exclusion list*); (7) pengurangan tarif bea masuk untuk barang-barang produksi ASEAN agar terus dilanjutkan. Usaha ini dilakukan untuk memperluas perdagangan antar negara ASEAN; (8) hambatan non-tarif terhadap impor (*Non Tariff Barrier - NTB*) harus dihentikan, dan negosiasi masalah NTB ini harus segera dilakukan setelah KTT III ini; (9) proses persetujuan proyek industri dalam AIJV agar lebih dipermudah, sehingga proyek AIJV dapat meningkat jumlahnya, karena pengusaha swasta tampaknya semakin tertarik pada proyek tersebut; (10) ASEAN sepakat untuk mendirikan perusahaan Reasuransi ASEAN paling lambat tahun 1988; (11) penggunaan mata uang ASEAN untuk mempermudah perdagangan antar negara anggota ASEAN akan diusahakan; (12) pajak berganda, efisiensi administrasi pajak dan bea cukai harus segera diatur; (13) ASEAN agar bekerjasama dalam perdagangan internasional untuk meningkatkan pasaran komoditi mereka; (14) industri yang berdasarkan kekayaan alam ASEAN harus dikembangkan; (15) perjalanan antar ASEAN dan industri pariwisata ASEAN agar dikembangkan. Sehubungan dengan ini tahun 1992 yang merupakan ulang tahun ke-25 ASEAN diusahakan sebagai Tahun Wisata ASEAN (Kunjungan Tahun ASEAN); (16) kerjasama energi harus terus dilanjutkan, termasuk perencanaan energi, pertukaran informasi, riset dan pengembangan eksplorasi, dan sebagainya; (17) kerjasama perhubungan dan komunikasi agar terus dikembangkan, dan untuk itu ASEAN agar terus mempelajari *Brokers Telegraph System*, *Inter ASEAN Bulk Pool System*, pelayanan pelayaran point to point, dan sebagainya; (18) kerjasama

struktur pertanian dan kehutanan di ASEAN; (19) dalam dialog ASEAN dengan Australia, Selandia Baru, Jepang, MEE, AS dan Kanada, masing-masing anggota ASEAN agar menekankan perlunya peningkatan pasar, perdagangan, promosi pariwisata, investasi, alih teknologi, pengembangan sumberdaya alam dan sebagainya; (20) struktur organisasi ASEAN agar terus ditingkatkan, dengan menekankan efisiensi; (21) kerjasama ASEAN akan diperluas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (*Kompas*, 16-12-1987).

Empat perjanjian dan sebuah *Memorandum of Understanding* itu meliputi: (1) protokol perubahan atas Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang ditandatangani oleh para Menlu ASEAN. Perubahan ini dilakukan untuk memungkinkan Papua Nugini (PNG) ikut menandatangani perjanjian kerjasama di Asia Tenggara dengan seijin negara Asia Tenggara yang menandatangani perjanjian itu dan Brunei; (2) peninjauan kembali atas AIJV yang ditandatangani oleh para Menlu ASEAN. Ini memungkinkan pihak swasta dan perusahaan-perusahaan patungan untuk melaksanakan kerjasama dalam AIJV tersebut; (3) persetujuan mengenai Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal, yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi; (4) protokol mengenai Penyempurnaan Perluasan Tarif Preferensi berdasarkan PTA, yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi, dan (5) *Memorandum of Understanding* mengenai Penghapusan atau Pengurangan Hambatan-hambatan terhadap Perdagangan antar negara anggota ASEAN, yang ditandatangani pula oleh para Menteri Ekonomi.

Seusai KTT itu, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan pernyataan pers bersama, yang sebagian besar berisi penekanan peringkatan kerjasama ekonomi. Para Kepala Pemerintahan ASEAN: (1) menegaskan kembali pentingnya kerjasama ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan stabilitas regional; (2) setuju untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara ASEAN; (3) menegaskan kembali komitmen mereka tentang kerjasama ASEAN untuk mempercepat pembangunan industri yang sehat; (4) setuju untuk meningkatkan kerjasama keuangan dan perbankan guna meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Di samping itu, para pemimpin ASEAN sepakat untuk meningkatkan frekuensi pertemuan mereka, menjadi 3-5 tahun sekali.

## II. KEGIATAN KERJASAMA ASEAN

### A. KERJASAMA MAKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

#### 1. *Penanaman Modal Perikanan*

Sidang kelompok Koordinasi Perikanan dalam Kerjasama Makanan, Perikanan dan Kehutanan (COFAF) ke-9 berlangsung di Jakarta tanggal 9 Februari 1988 untuk membahas kerjasama perikanan.

Menteri Pertanian Achmad Affandi mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) Indonesia membuka pintu bagi penanam modal di bidang perikanan; (2) penanam modal dalam negeri dan modal asing perlu membina petani dan nelayan kecil, karena usaha ini dapat menguntungkan pihak swasta, penanam modal, petani dan nelayan kecil. Di Indonesia, sistem ini dikenal sebagai Proyek Inti Rakyat (PIR); (3) modal asing dan modal dalam negeri agar membantu kegiatan produksi, pemeliharaan dan pemasaran ikan.

## 2. Kerjasama Produsen Karet

Pertemuan empat negara ASEAN produsen karet berlangsung di Jakarta tanggal 26 Februari 1988.

Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Ir. Hasjruil Harahap mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa perusahaan karet Indonesia, Malaysia dan Muangthai perlu bekerjasama dan membentuk Pusat Perdagangan Karet di Singapura, karena informasi pasar ini penting bagi industri pertanian, khususnya bagi Indonesia.

Harry Tanugraha dari Bursa Komoditi Indonesia mengatakan pada pertemuan itu bahwa Pusat Perdagangan Karet itu perlu dibentuk karena pasaran karet alam di dunia sangat lemah padahal negara-negara ASEAN produsen karet merupakan pemasok (pensuplai) kebutuhan karet dunia (*Suara Pembaruan*, 1-3-1988).

## 3. Pembibitan Rotan

Pada tanggal 7 Maret 1988, Kakanwil Kehutanan Kalimantan Selatan, Ir. H. Toehadi, mengatakan bahwa: (1) Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Pusat Peremajaan Rotan ASEAN (PPRA) karena: (a) 1.000 hektar lahan di Banjar Baru cocok untuk pembibitan; (b) pabrik pengolahan berbagai produk rotan di daerah ini sangat meningkat (*Kompas*, 11-3-1988); (c) propinsi ini berhasil meningkatkan ekspor rotan sebagai penunjang ekspor non-migas; (2) proyek ini dibiayai oleh keenam negara anggota ASEAN yang masing-masing menyediakan US\$1 juta; (3) peremajaan rotan dimulai tahun 1988 di daerah Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai (*Antara*, 11-3-1988).

## B. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

### 1. Rencana Peningkatan Pariwisata

Ketua Sub-Komite Pariwisata ASEAN, Narzalina Z. Lim, mengatakan kepada *Philippines News Agency* (PNA) tanggal 19 Januari 1988 bahwa US\$5 juta dari US\$8 juta anggaran promosi "Kunjungilah ASEAN Tahun 1992" akan ditanggung oleh ASEAN. Kekurangannya akan ditutup dengan bantuan Jepang dan Masyarakat Ekonomi Eropa (*The Jakarta Post*, 30-1-1988).

### 2. Usaha Menghapuskan Hambatan Non-tarif

Pertemuan Komite Perdagangan dan Pariwisata ASEAN (COTT) berlangsung di Singapura tanggal 26-29 Februari 1988. Rekomendasi pertemuan itu menyatakan bahwa ASEAN berupaya menghapuskan hambatan non-tarif, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah. Usaha ini diawali dengan pengidentifikasian hambatan non-tarif dan penyusunan langkah-langkah untuk lima tahun mendatang (*Antara*, 1-3-1988).

(APTA) naik menjadi 14.462. Batas Preferensi bagi 3.200 jenis barang dinaikkan dari 25% menjadi 50% untuk periode lima tahun mendatang, dan telah diajukan kepada Federasi KADIN ASEAN Singapura dan Asosiasi Pabrikasi Singapura. Barang-barang itu antara lain adalah mesin pemroses data, suku cadang komputer, mesin pengolah makanan dan sari gandum (*Antara*, 21-3-1988).

### C. KERJASAMA ENERGI ASEAN

Pertemuan Kerjasama Energi ASEAN Ke-7 berlangsung di Brunei tanggal 6-7 April 1988 untuk membahas kemajuan proyek kerjasama energi, rencana proyek baru dan program kerjasama energi di masa mendatang (*Antara*, 6-4-1988). Pertemuan itu menetapkan: (1) penyusunan prosedur suatu sistem keamanan suplai minyak ASEAN akan dibahas di Malaysia, Juni 1988; (2) ASEAN akan membentuk suatu kelompok ahli untuk memperluas kerjasama teknologi sumber energi baru (*Antara*, 9-4-1988).

Menteri pada Kantor Perdana Menteri Malaysia, Kasitah Gaddam, mengatakan kepada Senat tanggal 30 Maret 1988 bahwa: (1) keikutsertaan Malaysia dalam ASCOPE itu menguntungkan, karena program keamanan minyak ASEAN dapat menjamin suplai minyak mentah dan produk minyak yang memadai pada waktu krisis; (2) Malaysia dapat mengetahui suatu perjanjian bagi hasil yang bisa merangsang investasi asing; (3) pembahasan operasi kilang minyak dapat meningkatkan pengetahuan tentang teknologi mutakhir; (4) para pejabat Petronas (Perusahaan Minyak Malaysia) memperoleh keuntungan dalam berbagai program latihan, seminar dan lokakarya tentang industri perminyakan ASCOPE (*Antara*, 31-3-1988).

### D. KERJASAMA PENERBANGAN

Pertemuan Sub-komite Pelayanan dan Penerbangan Sipil ASEAN Ke-11 berlangsung di Manila awal April 1988. Menteri Transportasi dan Komunikasi Filipina, Rainero Reyes, mengatakan: (1) kegagalan ASEAN untuk mencapai konsesi dari beberapa negara Barat dalam perjanjian udara mencerminkan kelemahan ASEAN; (2) ASEAN harus bekerjasama untuk menanggulangi berbagai masalah penerbangan sipil (*Antara*, 12-4-1988).

### E. SIDANG KOMISI ILMU DAN TEKNOLOGI

Pertemuan Komisi Ilmu dan Teknologi ASEAN Ke-18 berlangsung di Bangkok tanggal 6-10 April 1988 untuk membahas: (1) kemajuan dan proyek ASEAN di bidang makanan, energi, teknologi dan lingkungan, perkembangan sumberdaya manusia di bidang sains dan teknologi serta alih teknologi; (2) rencana pameran Sains dan Teknologi ASEAN di Manila tanggal 30 Januari-4 Februari 1989 (*Antara*, 12-4-1988).

### F. USAHA MENANGGULANGI BAHAYA NARKOTIKA

Pertemuan para Pejabat Senior ASEAN Mengenai Narkotika Ke-11 berlangsung di Singapura

Penyelundupan Narkotika di Wina tahun 1987" sebagai pedoman dasar untuk memberantas pelanggaran narkotika. Keputusan-keputusan lainnya: (1) pendekatan multidisipliner regional untuk memberantas penyalahgunaan narkotika akan ditingkatkan; (2) ASEAN tetap meneruskan perang melawan narkotika selama penyelundupan narkotika internasional masih berlangsung; (3) pertukaran informasi akan ditingkatkan; (4) mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika didaftarhitamkan (*Antara*, 7-4-1988); (5) ASEAN menetapkan lima proyek baru bersama selama lima tahun dengan biaya US\$5 juta, yakni: (a) pendirian pusat latihan penegak hukum narkotika di Muangthai; (b) pendirian pusat latihan dan rehabilitasi petugas di Malaysia; (c) pendirian studi observasi para pemimpin kepemudaan penanggulangan narkotika di Brunei; (d) pendirian pusat evaluasi perkembangan di Filipina; (e) pendirian pusat riset dan latihan di Singapura (*Antara*, 9-4-1988).

Di samping itu, berlangsung pula sebuah lokakarya Ahli Hukum dan Anti Narkotika ASEAN di Manila tanggal 9-29 April 1988 untuk membahas: (1) strategi penyelidikan dan penyitaan harta gelap pengedar narkotika; (2) rancangan peraturan yang seragam di antara negara ASEAN untuk menangani kewanan dan pengedar narkotika di kawasan ASEAN.

Wakil Menteri Kesehatan Filipina, Thomas P. Maramba, mengatakan bahwa: (1) pertemuan ini berhasil membentuk kelompok pengkaji masalah penyelidikan dan penyitaan harta gelap para pengedar obat terlarang; (2) pemberlakuan hukum tentang penyitaan kekayaan yang tidak sah oleh para pengedar narkotika akan dilakukan (*Antara*, 5-2-1988).

### G. PROYEK BARU KEBUDAYAAN

Pertemuan Komite Kebudayaan dan Informasi ASEAN (*Committee Organization of Culture Information* atau COCI) Ke-17 berlangsung di Kualalumpur tanggal 28-31 Maret 1988. Deputy Menteri Penerangan Malaysia, Railey Haji Jeffrey, menyampaikan sambutan Menteri Penerangan Mohamad Rahmat sebagai berikut: (1) ASEAN harus bekerja keras untuk mengawasi arus informasi Barat yang tidak seimbang; (2) peningkatan berbagai program pertukaran di antara negara ASEAN dapat mencegah penyebaran kebudayaan asing yang tidak diinginkan; (3) pengembangan kebudayaan dan pertukaran informasi melalui COCI dapat membentuk identitas ASEAN; (4) ciri dan peninggalan ASEAN dapat diketahui dari seni rakyat mereka; (5) Malaysia berusaha memperkokoh persaudaraan antara rakyat negara anggota ASEAN dengan meningkatkan atraksi wisata ASEAN melalui program televisi tanpa batasan (*Antara*, 28-4-1988).

Pertemuan memutuskan: (1) 29 proyek baru senilai US\$1.9 juta untuk anggaran 1988/1989, 9 proyek di antaranya dibiayai oleh negara ketiga dan organisasi internasional; (2) hasil KTT Manila 1987 merupakan dasar kegiatan di masa mendatang; (3) kemampuan profesional pendidikan serta penelitian masyarakat dan kebudayaan ASEAN akan dikembangkan; (4) arus informasi melalui jalur perpustakaan nasional dan perbaikan tarif komunikasi akan ditingkatkan; (5) penggunaan peralatan modern akan ditingkatkan agar kebudayaan ASEAN dikenal di seluruh dunia (*Antara*, 18-4-1988).

### III. PERGANTIAN DIRJEN SEKNAS ASEAN

#### IV. KERJASAMA PARLEMEN

Sidang AIPO (*ASEAN Inter Parliamentary Organisation*) Ke-9 berlangsung di Singapura tanggal 25-30 Januari 1988 untuk membahas masalah politik, ekonomi dan organisasi sebagai tindak lanjut dari KTT ASEAN III di Manila 1987; (2) masalah pengungsi; (3) situasi ekonomi dunia; (4) usul pendirian sekretariat tetap AIPO; (5) pembentukan Parlemen ASEAN; dan (6) program legislatif umum yang berkaitan dengan perlindungan margasatwa (*Antara*, 25-1-1988).

Ketua AIPO Mohammed Zahir Ismail mengatakan bahwa: (1) pembentukan komite program undang-undang bersama mengenai narkoba dan rehabilitasi yang dirancang Malaysia 3 tahun lalu terhambat oleh perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan hukum (*Antara*, 26-1-1988); (2) pembentukan Parlemen ASEAN seperti Parlemen Eropa bisa diwujudkan asal disesuaikan dengan kondisi dan tujuan dari organisasi ini; (3) program bersama pembuatan Undang-undang Narkotika dan pengobatan pencandu narkoba merupakan langkah awal untuk menyusun program bersama yang lain (*Antara*, 28-1-1988).

PM Mahathir Mohamad mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) para anggota parlemen sesama negara ASEAN perlu mencari jalan penyelesaian masalah Kamboja; (2) ketegangan proteksionisme di negara-negara berkembang dapat menimbulkan kesulitan di negara sedang berkembang sendiri; (3) pemerintahan minoritas kulit putih di Afrika Selatan harus di-boikot seluruhnya (*Antara*, 27-1-1988); (4) pembentukan Parlemen ASEAN yang ideal masih memerlukan waktu yang panjang (*Kompas*, 27-1-1988).

Pada kesempatan yang sama, Ketua delegasi Indonesia, Kharis Suhud, menyampaikan pesan Presiden Soeharto sebagai berikut: (1) ASEAN akan bertambah kuat dan langgeng bila didukung oleh seluruh rakyat negara ASEAN; (2) AIPO diperlukan untuk memastikan agar ASEAN dapat mencapai cita-cita rakyat negara anggotanya.

Ketua delegasi Filipina, Antonio V. Cuenco, menyampaikan pesan Presiden Corazon Aquino yang mendesak negara-negara anggota ASEAN agar melipatgandakan usaha untuk menjamin masa depan yang lebih cerah bagi rakyat di kawasan Asia Tenggara.

Ketua delegasi Singapura, Dr. Yeoh Ghim Seng, menyampaikan pesan Presiden Wee Kim Wee sebagai berikut: (1) perubahan perimbangan kekuatan ekonomi di dunia, peningkatan perkembangan teknologi, merosotnya harga komoditi negara berkembang dan peningkatan proteksionisme semakin memperberat tantangan ASEAN; (2) sesama negara anggota ASEAN agar terus meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan; (3) semangat kepercayaan dan saling menghormati antar negara ASEAN merupakan pendorong kemajuan dan keberhasilan ASEAN.

Ketua delegasi Muangthai, Chuan Leekpai, menyampaikan pesan PM Prem Tinsulanonda sebagai berikut: (1) ASEAN kini terikat pada prinsip-prinsip bersama untuk memelihara kemakmuran dan kestabilan di kawasannya melalui kerjasama dan tidak campurtangan masalah dalam negeri; (2) ASEAN akan memenuhi ikrar saling tolong menolong dan mengeratkan persahabatan untuk memastikan agar kawasan ini benar-benar aman (*Antara*, 27-1-1988).

## V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

### ASEAN-AS

Pertemuan delegasi KADIN ASEAN dan KADIN AS berlangsung di Washington pada pertengahan Januari 1988 untuk membahas usaha peningkatan perdagangan dan investasi, RUU tentang Komoditi Impor ASEAN yang akan diajukan kepada Kongres AS serta pencegahan proteksionisme AS.

Dalam makalahnya pada pertemuan KADIN itu, Ketua Dewan Direksi Caltex Pacific Indonesia, Haroen Al Rasjid, mengatakan bahwa: (1) kawasan ASEAN mempunyai sumberdaya energi yang cukup untuk mengembangkan berbagai industri raksasa; (2) penurunan nilai ekspor migas ASEAN di pasaran dunia diimbangi dengan diversifikasi ekspor LNG dan LPG; (3) LNG dari ketiga negara ASEAN dipasarkan ke Asia Utara, karena pasaran di Jepang agak jenuh (*Angkatan Bersenjata*, 20-1-1988).

Surat protes ASEAN yang ditandatangani oleh Komite Washington ASEAN dan ditujukan kepada Menlu AS, George Shultz, beredar pada pertemuan persiapan ASEAN di Washington tanggal 7 Februari 1988. Surat itu menuduh AS melanggar persetujuan bebas bea atas produk ekspor dari Singapura berdasarkan sistem preferensi umum (GSP), yang dikukuhkan Januari 1987 (*Kompas*, 11-2-1988).

Juru bicara kantor perdagangan AS, Hary Holmes, menanggapi protes itu dengan mengemukakan bahwa AS: (1) tidak akan mempertimbangkan kembali pencabutan GSP bagi Singapura, karena perekonomian negara ini lebih baik daripada negara-negara berkembang lainnya yang mendapatkan GSP; (2) belum merencanakan untuk mencabut GSP bagi Indonesia, Malaysia, Filipina dan Muangthai (*Kompas*, 11-2-1988).

Menteri Perdagangan Indonesia, Rahmat Saleh, mengatakan pada pertemuan Himpunan Pengusaha Rotan di Departemen Perdagangan tanggal 11 Februari 1988: (1) agar para pengusaha Indonesia memanfaatkan GSP (*Generalized System Preferential*), supaya komoditi eksportnya dapat bersaing, bebas bea masuk dan dapat melakukan perdagangan langsung dengan negara yang bersangkutan; (2) fasilitas GSP diperoleh melalui korespondensi dan informasi tentang jenis mutu dan harga barang komoditi yang bersaing (*Angkatan Bersenjata*, 12-2-1988).

Wakil Menlu AS Urusan Ekonomi, Allen Wallis, mengatakan di Washington bahwa AS menolak kemungkinan studi bersama untuk menciptakan perjanjian perdagangan bebas AS-ASEAN, tetapi AS bersedia meningkatkan investasi dan perdagangan dengan ASEAN (*Kompas*, 13-2-1988).

Pembantu Menlu AS untuk Urusan Asia Timur, Gaston Sigur, mengatakan di Foreign Press Centre tanggal 9 Februari 1988 bahwa: (1) AS tidak akan melepaskan negara ASEAN mana pun kecuali Singapura dari program GSP; (2) surplus perdagangan bukan merupakan faktor dalam pencabutan GSP, tetapi ditentukan oleh faktor pertumbuhan pendapatan per kapita, perluasan

## B. ASEAN-KANADA

Pertemuan Panitia Kerjasama Kanada-ASEAN (JCC) Ke-5 berlangsung di Ottawa tanggal 7-8 April 1988, untuk membahas perkembangan kerjasama ASEAN-Kanada serta situasi ekonomi dan perdagangan dunia. Masing-masing delegasi dipimpin oleh Khun Chawat Arthayukili, Dirjen ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Muangthai dan Mrs. Jean McCloskey, Deputy Asisten Menteri Urusan Asia-Pasifik, Kementerian Luar Negeri Kanada.

Mrs. Jean McCloskey menegaskan bahwa hasil pembicaraan masalah ekonomi internasional dapat menjadi bahan pembahasan Pertemuan Puncak Ekonomi negara maju di Toronto, Juni 1988.

ASEAN mengatakan bahwa: (1) Kanada mempunyai potensi untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia; (2) ASEAN ingin menjalin kerjasama pembangunan yang berfokus pada proyek jangka menengah dan panjang di bidang perdagangan, pariwisata dan promosi penanaman modal, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, jalinan kelembagaan dan pembangunan sumberdaya manusia.

Kedua pihak sepakat bahwa: (1) JCC memperkokoh semangat kerjasama; (2) kerjasama antara ASEAN dan Kanada perlu ditingkatkan.

Di samping itu Kanada menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bilateral antara AS-Kanada penting untuk mengurangi proteksionisme dan menciptakan perdagangan bebas (*Antara*, 13-4-1988).

## C. ASEAN-MEE

Komisaris Hubungan Luar Negeri MEE, Willy de Clercq, mengatakan di Denpasar tanggal 7 Januari 1988 bahwa modal pasar MEE di ASEAN turun dari 17% tahun 1973 menjadi 11% tahun 1986. Dalam periode yang sama modal pasar Jepang di ASEAN tetap 26%, sedang AS naik dari 16% menjadi 26% (*Antara*, 8-1-1988).

Duta Besar Indonesia di PBB, Ali Alatas, mengatakan kepada para pengusaha AS di Washington tanggal 10 Maret 1988 bahwa: (1) titik tolak ASEAN dan MEE berbeda. Eropa Barat hampir menuju kepada integrasi regional, sementara ASEAN sedang berusaha meletakkan dan memupuk kerjasama regional menjadi alat kebijaksanaan bersama; (2) negara Eropa Barat saling berhubungan secara intensif selama berabad-abad, sedangkan negara-negara Asia Tenggara belum mempunyai hubungan. Pandangan mereka terhadap negara tetangganya diwarnai oleh pengalaman penjajahan dan permusuhan masa lalu; (3) kerjasama regional negara-negara Eropa Barat adalah antara negara maju dan kaya, yang struktur industri dan ekonominya saling melengkapi, sedangkan kerjasama regional Asia Tenggara adalah antara negara-negara berkembang, yang sistem ekonominya berorientasi kepada pertanian dan ekspor; (4) ASEAN ketika dibentuk tidak menghadapi musuh bersama yang jelas seperti negara-negara MEE menghadapi Uni Soviet sebagai musuh bersama mereka (*Kompas*, 11-3-1988).

Bidang Ekonomi Konsulat Jenderal Indonesia di Bremen, Drs. Nazaruddin Koro, mengatakan di Hamburg tanggal 18 April 1988 bahwa: (1) langkah awal rencana peningkatan hubungan ekonomi yang dibahas dalam pertemuan ASEAN dan para pengusaha Bremen adalah menyetujui Bremen sebagai pusat perdagangan, pameran dan distribusi bagi komoditi ekspor ASEAN; (2) ASEAN mendapat prioritas dalam kebijaksanaan ekonomi luar negeri Jerman Barat, karena iklim penanaman modal di ASEAN itu dapat meningkatkan kegiatan ekspor-impor bagi kedua belah pihak (*Antara*, 19-4-1988).

#### D. ASEAN-JEPANG

##### 1. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan

Ketua Kerjasama Dana Luar Negeri Jepang (OECF), Mitshuhede Yamaguchi, mengatakan setelah diterima Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 22 Januari 1988 bahwa dari US\$2 milyar bantuan Jepang, belum dapat dirinci berapa besar yang akan diterima oleh masing-masing negara anggota ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 22-1-1988).

Pada tanggal 5 Februari 1988, Dirjen Badan Pengembangan Perdagangan Singapura, Ridzwan Dzafir, mengatakan bahwa: (1) Jepang mendukung pencabutan GSP AS untuk Singapura karena Jepang tidak memahami faktor ekonomi negara-negara berkembang; (2) Singapura menyesalkan keengganan Jepang untuk membuka pasaran bagi produk-produk ASEAN (*Pelita*, 6-2-1988).

Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Thomas Alacantia, mengatakan kepada para wartawan di Manila tanggal 9 Februari 1988 bahwa Filipina berusaha mendapatkan US\$700 juta dari Dana Pembangunan ASEAN-Jepang untuk membiayai proyek-proyek swasta melalui Bank Sentral Filipina (*Antara*, 11-2-1988).

Pertemuan para pejabat senior ASEAN dan delegasi Jepang berlangsung di Kualalumpur tanggal 3-4 Maret 1988 untuk membahas: (1) pengalokasian paket bantuan Jepang (US\$2 milyar) untuk jenis proyek tertentu yang memenuhi persyaratan; (2) usaha pengembangan industri swasta melalui investasi usaha patungan di negara-negara ASEAN (*Antara*, 3-3-1988).

Wakil Menteri Keuangan Malaysia, Loke Yuen Yow, mengatakan di parlemen tanggal 10 Maret 1988 bahwa pemerintah dan pihak swasta Malaysia mengajukan proyek senilai US\$800 juta, yang akan dibiayai oleh Dana Pembangunan ASEAN-Jepang melalui tiga Bank khusus dan Badan Keuangan Industri Malaysia (*Antara*, 11-3-1988).

Ketua Badan Bursa Saham Muangthai, Dr. Maruay Phadoongsidhi, mengatakan kepada para wartawan di Bangkok tanggal 23 Maret 1988 bahwa: (1) seratus tiga puluh investor Jepang telah bergabung membentuk suatu perusahaan modal untuk investasi proyek patungan di negara-negara ASEAN; (2) perusahaan itu harus mendaftarkan diri pada bursa saham di setiap negara ASEAN; (3) sembilan usaha patungan Jepang-Muangthai yang bermodal 13.700 juta Baht terdaftar di bursa saham Muangthai (*Antara*, 24-3-1988).

Perdana Menteri Jepang, Noburo Takheshita, mengatakan dalam sidang umum Kongres Nasional Sosial dan Ekonomi Ke-18 di Tokyo pertengahan April 1988 bahwa angsuran hutang

beban bagi ASEAN. Oleh karena itu Pemerintah Jepang berusaha mengurangi beban hutang tersebut (*Antara*, 19-4-1988).

Wakil Ketua Komisi APBN dari Fraksi-PP H. Hamzah Haz, mengatakan kepada *Kompas* tanggal 24 April 1988 bahwa: (1) kebijakan Jepang mengenai pengurangan beban hutang ASEAN pada saat perekonomian mengalami kelesuan sangat tepat; (2) Pemerintah Jepang agar melonggarkan jadwal pembayaran hutang dan bersedia menerima pembayaran hutang dalam bentuk dollar; (3) Jepang agar membuka pasaran yang seluas-luasnya bagi barang-barang Indonesia (*Kompas*, 22-4-1988).

## 2. Program Pertukaran Kebudayaan

Datuk Razali Ismail dan Noburu Nakahira, masing-masing Pejabat Sementara Sekjen Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Duta Besar Jepang untuk Malaysia, menandatangani Program Pendidikan Jepang-ASEAN (JAEP) di Kuala Lumpur tanggal 8 Maret 1988 untuk meningkatkan kerjasama pendidikan dan penelitian. Seluruh biaya proyek, US\$1,4 juta, ditanggung oleh Jepang. Dubes Nakahira mengatakan bahwa ASEAN akan diperkenalkan kepada rakyat Jepang melalui kunjungan artis, pelajar dan wartawan ASEAN ke Jepang serta pengiriman tenaga ahli Jepang ke negara-negara ASEAN (*Antara*, 9-3-1988).

## E. ASEAN-AUSTRALIA

Pertemuan para pejabat senior ASEAN untuk mempersiapkan Dialog ASEAN-Australia berlangsung di Bangkok tanggal 13-14 Maret 1988 untuk membahas perdagangan tekstil, tarif dan cukai Australia serta kemajuan program bantuan Australia (*Antara*, 15-3-1988).

## VI. HUBUNGAN ASEAN - PARLEMEN EROPA

Dialog AIPO-Parlemen Eropa Ke-6 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 27-28 Januari 1988 untuk membahas: (1) hasil KTT ASEAN 1987 di Manila; (2) kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa Barat dan negara-negara anggota AIPO; (3) penanaman modal; (4) suasana politik regional dan internasional; (5) pertukaran kunjungan delegasi Parlemen anggota AIPO dan Parlemen Eropa; (6) kerjasama kebudayaan (*Kompas*, 12-4-1988).

AIPO mengemukakan berbagai kritik, khususnya mengenai pungutan yang dikenakan masyarakat Eropa atas lemak dan minyak jenuh. Pembebasan pasar, proteksionisme dan pemasaran produk tropis dan hak cipta dikritik pula oleh AIPO.

Delegasi Parlemen Eropa yang dipimpin oleh Guenter Rinshe, Ketua Parlemen Jerman Barat, mengatakan: (1) perdagangan antara MEE dan ASEAN masih jauh dari yang diharapkan; (2) negara-negara Eropa masih mempunyai kesulitan untuk memasarkan hasil pertaniannya sebagai akibat perbedaan kebijakan ekonomi yang sukar dikompromikan; (3) Parlemen Eropa berusaha mencegah diberlakukannya proteksionisme dan mengusulkan perbaikan-perbaikan untuk memperkokoh hubungan dagang dengan ASEAN; (4) ASEAN harus membuka lebih banyak pasar

melalui dialog untuk mengatasi rintangan-rintangan (*Kompas*, 12-1-1988); (5) besarnya delegasi Parlemen Eropa yang hadir membuktikan minat besarnya untuk berdialog; (6) ASEAN dan MEE harus bekerjasama untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan dunia; (7) dialog dapat memberi sumbangan yang berharga untuk mengatasi rintangan komunikasi (*Merdeka*, 29-1-1988).

Kedua pihak sepakat untuk memperkokoh dan memperluas kerjasama dan mengharapkan agar jadwal pertemuan yang disepakati sembilan tahun lalu dilaksanakan secara teratur (*Antara*, 29-1-1988).

## VII. HUBUNGAN DAGANG ASEAN-RRC

Kantor Berita Cina, *Hsinhua*, tanggal 17 April 1988 memberitakan bahwa dalam triwulan pertama 1988, nilai perdagangan ASEAN-RRC mencapai US\$1,13 milyar. Impor RRC dari ASEAN mencapai US\$564 juta, sedang ekspornya mencapai US\$566 juta (*Antara*, 18-4-1988).



## Para Penulis

ANALISA NO. 4, 1988



**DJIWANDONO, J. Soedradjad.** Berijazah Sarjana Ekonomi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1963; M.Sc. dalam ekonomi dari Universitas Wisconsin, Madison, USA tahun 1966 dan Ph.D. dalam ekonomi dari Universitas Boston, USA (1980); kini adalah Menteri Muda Perdagangan Kabinet Pembangunan V, Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; sebelumnya adalah Asisten Menko Ekuin pada Kabinet Pembangunan IV, Kepala Biro Moneter dan Keuangan Negara BAPPENAS dan Staf Ahli Sekretaris Dewan Moneter, Staf Peneliti (1963-1978) dan Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, LEKNAS-LIPI serta Asisten Menteri Perdagangan pada Kabinet Pembangunan I. Bidang perhatian: Moneter, Ekonomi Internasional, Keuangan Negara, Ekonomi Pembangunan dan Teori Ekonomi.

**SIMANDJUNTAK, Djisman S.** Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Parahyangan, Bandung (1973); pada tahun 1979 mendapat diploma ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Cologne, Jerman Barat. Dari fakultas dan universitas yang sama pada tahun 1983 memperoleh Ph.D dalam Ilmu Ekonomi. Mengawali tugasnya di CSIS sejak tahun 1974 sebagai Staf Peneliti pada Departemen Ekonomi. Sejak tahun 1984 menjabat Kepala Departemen Ekonomi, CSIS, kini Koordinator Program Studi Sistem dan Struktur Ekonomi, CSIS.

**SOESASTRO, M. Hadi.** Sarjana di bidang Teknik Pesawat Terbang (Dipl. Ing.), Rheinisch Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, 1971 dan pada 1978 memperoleh Ph.D. dari The Rand Graduate Institute for Policy Studies, Santa Monica, Amerika Serikat; kini anggota Dewan Direktur dan Wakil Direktur untuk Program Studi Internasional dan Keamanan, CSIS; Anggota Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia (1981- ), Dosen FISIP dan Fakultas Eko-